

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Filipina adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai kedekatan dengan Amerika. Hubungan kerjasama ini sudah terjalin semenjak Filipina memperoleh kemerdekaannya. Hubungan yang terjalin antara Filipina dan Amerika meliputi hubungan kerjasama ekonomi politik.

Bahkan setelah kemerdekaan yang diperolehnya, Filipina menggantungkan perekonomian negara kepada Amerika, ini dapat dilihat dari banyaknya pengaruh Amerika dalam investasi, perdagangan bahkan sampai pada sistem pengajaran yang menghasilkan Bahasa Inggris yang lebih banyak digunakan oleh orang Filipina, dan pada sistem pemerintahan Filipina pun menganut sistem yang merupakan warisan dari Amerika yakni Demokrasi.<sup>1</sup>

Sejak peristiwa 11 September 2001 terjadi, dengan cepat perekonomian Amerika mengalami banyak sekali penurunan ditandai dengan terjadinya defisit perdagangan. Semua ini mengakibatkan Filipina mulai melakukan perdagangan yang lebih intensif dengan negara lain di kawasan Asia contohnya seperti dengan Cina. Tetapi sebelum melakukan hubungan diplomatic yang direalisasikan dalam bentuk kerjasama ekonomi dan politik ini, Cina memberikan satu syarat yakni negara manapun yang ingin membina hubungan diplomatic dengan Cina, harus mengakui mengenai Kebijakan Satu Cina (*One China Policy*).<sup>2</sup> Hubungan kerjasama Filipina – Cina ini sangatlah bertolak belakang

---

<sup>1</sup> J.E. Spencer & William L. Thomas, *Asia, East by South: a culture geography (second edition)*, JOHN & SONS, INC, Amerika Serikat, 1971, hal.481-497

<sup>2</sup> Suatu Prinsip utama yang mendasari hubungan antara Filipina-Cina adalah Kebijakan Satu Cina. Penanda tangan komunikasi bersama pada tahun 1975 menandai terjalannya hubungan diplomatic antara Filipina

dikarenakan Filipina adalah sekutu Amerika di kawasan Asia sedangkan hubungan antara Cina dan Amerika selalu saja dalam keadaan yang tidak menentu. Saya memilih pada masa pemerintahan Gloria Arroyo,, dikarenakan pada masa pemerintahan inilah kerjasama ekonomi dengan Cina mengalami kenaikan, terutama pasar ekspornya. Seperti dalam kunjungannya tiga hari di Cina yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama kedua negara terutama dibidang ekonomi dan mengurangi ketegangan soal sengketa pulau Spratly. Selain itu, Presiden Gloria Arroyo juga menegaskan kembali dukungannya terhadap One China Policy demi hubungan kedua negara.<sup>3</sup> Dengan meningkatnya hubungan ekonomi kedua negara ini maka pada masa pemerintahan Gloria Arroyo penyelesaian mengenai Spratly dapat dijadikan sebagai kerjasama bilateral ataupun multilateral, ini dapat dilihat dengan adanya penandatanganan kontrak pemetaan wilayah perikanan, minyak dan gas alam. Dengan adanya kerjasama ini, maka akan sangat membantu bagi Filipina dalam menjaga keutuhan wilayahnya.

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berakhirnya Perang Dingin tahun 1971, membawa pengaruh terhadap politik internasional.<sup>4</sup> Hal ini ditandai dengan dibukanya tembok beton yang membelah dua kota Berlin pada 9 November 1989. Peredaan antara Barat dan Timur itu mencapai puncaknya

---

dan *People Republik Of China* ( RRC ). Dalam hubungan diplomatic ini Filipina mengakui pemerintahan RRC sebagai pemerintahan yang sah dari rakyat Cina, dan benar – benar menghargai posisi dari pemerintahan cina bahwa hanya ada Satu Cina dan bahwa Taiwan merupakan wilayah dari teritori Cina. Doktrin ini sekarang sebagai Kebijakan Satu Cina, yang harus diakui oleh banyak negara jika ingin melakukan hubungan diplomatic dengan Cina. Dapat dilihat dalam : [www.ops.gov.ph/chinavisit2004/backgrounder.htm#Overview](http://www.ops.gov.ph/chinavisit2004/backgrounder.htm#Overview).

<sup>3</sup> “Arroyo bertolak ke Cina, Tingkatkan Hubungan Dua Negara”, dalam [www.kapanlagi.com/h/0000028054.html](http://www.kapanlagi.com/h/0000028054.html)

<sup>4</sup> Perang Dingin adalah ketegangan & permusuhan yang sangat ekstrim antara blok barat dan blok timur setelah terjadinya perang dunia kedua. Periode Perang Dingin ini ditandai dengan adanya manuver pertikaian diplomatic, perang psikologis, permusuhan ideology, perang ekonomi, pacuan senjata, dll. Dilihat dari, *Kamus Hubungan Internasional ( terjemahan )*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal. 142

dengan bersatunya dua Jerman yang terjadi pada 3 Oktober 1990.<sup>5</sup> Berakhirnya Perang Dingin di Eropa dengan cepat meredam pula ketegangan antara kedua negara adidaya di berbagai bagian dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik dan Asia Timur. Peredaan Perang Dingin di kawasan Asia Pasifik, diikuti dengan kepergian Uni Soviet dari Vietnam dan Amerika Serikat dari Filipina. Meredanya Perang Dingin membuat banyak negara menginginkan agar terjadinya perubahan terhadap perekonomian dan politik dunia menjadi lebih baik. Tetapi semua itu tidak dapat terjadi dikarenakan situasi ekonomi-politik Uni – Soviet sedang dalam penurunan sehingga mengakibatkan keadaan jadi tidak menentu (*Uncertainty*). Ketidak-menentuan ini juga dirasakan pada kawasan Asia, yakni bersamaan dengan perginya Uni Soviet dari kawasan Asia Tenggara, semua itu dikarenakan selama ini keseimbangan keamanan kawasan Asia dapat terjamin dengan adanya keseimbangan antara tiga kekuatan besar Asia Pasifik yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina.

Pasca perang dingin banyak hal yang mengalami perubahan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Perubahan yang terjadi adalah bahwa negara – negara di Asia Tenggara mencoba untuk mengatur kawasannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Ini diawali pada bidang keamanan kawasan lalu berlanjut ke bidang politik, namun kemudian negara – negara Asia Tenggara ini menyadari bahwa sekarang ini ada ancaman baru yang muncul, yakni ancaman dari bidang ekonomi. Maka sejak itu negara – negara Asia Tenggara mulai melakukan kerjasama yang lebih intens dengan sesama negara kawasan. Semua kerjasama yang dilakukan ini bertujuan agar negara – negara kawasan Asia ini dapat berkompetisi dengan negara – negara barat dalam menghadapi era

---

<sup>5</sup> James Luhulima, *Asia Tenggara dan Negara Luar Kawasan Yang Mempengaruhinya : Pendekatan Politik dan Keamanan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 2

globalisasi dengan sistem ekonomi global yang akan terjadi pada abad 21 nanti. Untuk mempersiapkan semua itu maka masyarakat non-barat khususnya masyarakat di Asia Timur terus mengembangkan kekayaan ekonomi mereka dan bersamaan dengan itu terjadi pula peningkatan kekuatan dan kepercayaan diri.<sup>6</sup> Seperti yang terjadi pada Cina, pasca perang dingin negara ini mulai banyak melakukan reformasi baik di bidang politik ataupun ekonomi. Sehingga tidak mengherankan jika sejak tahun 1990an semakin nyata bahwa mesin pertumbuhan (*engine of growth*) kegiatan ekonomi intra regional Asia adalah Cina dengan Jepang.<sup>7</sup> Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomiannya, Cina banyak melakukan hubungan kerjasama dengan negara – negara lain terutama negara – negara sekitar Asia. Tapi sebelum menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, negara – negara Asia Pasifik yang ingin memelihara hubungan diplomatik dengan Cina harus menghormati dan menjalankan Prinsip Satu Cina, yakni dengan menganggap bahwa Taiwan adalah bagian wilayah Cina dan bukan sebagai negara merdeka.<sup>8</sup>

Filipina adalah salah satu negara yang menjalin hubungan kerjasama dengan Cina. Hubungan kerjasama Filipina-Cina sebenarnya sudah terjadi sejak Filipina memperoleh kemerdekaan mereka pada tahun 1946 secara utuh. Bahkan jauh sebelumnya, kerjasama ini telah ada pada masa pendudukan Spanyol di Filipina. Semua ini dapat diketahui dari peran etnis Cina di Filipina dimana mereka memainkan peranan vital dalam perekonomian negara itu, yakni dalam bidang perindustrian, mereka menepati posisi penting. Tetapi secara resmi hubungan Filipina-Cina ini baru terjalin tahun 1975 dengan ditandatanganinya komunike bersama. Setelah penandatanganan, hubungan

---

<sup>6</sup> T. May Rudy, *Studi Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002 hal. 62

<sup>7</sup> Bob Widayartono, *Bangkitnya Naga Besar Asia : Peta Politik, Ekonomi, dan Sosial China menuju China Baru*, ANDI, Yogyakarta, 2004, hal. 79

<sup>8</sup> “ Cina Waspadai diplomasi Dollar Taiwan ”, [www.sinarharapan.co.id/berita/0408/12/Lua02.html](http://www.sinarharapan.co.id/berita/0408/12/Lua02.html) .

diantara kedua negara ini semakin mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dengan adanya penandatanganan beberapa perjanjian bilateral, diantaranya : Joint Trade Agreement (1975) ; Scientific and Technological Cooperation Agreement (1975) ; Postal Agreement (1978) ; Air Services Agreement (1979) ; Cultural Agreement (1979).<sup>9</sup>

Hubungan bilateral yang terjalin dengan sangat baik oleh kedua negara sempat mengalami beberapa hambatan dan hampir putus. Itu semua karena tahun 1989 terjadi pertentangan mengenai kapal Filipina dengan kapal Cina yang ada di kawasan Laut Cina Selatan, ditambahkan lagi dengan pemberitaan oleh pemerintahan Filipina yang mengatakan bahwasannya Cina telah menempatkan kapal perangnya dan telah membangun fasilitas militernya di kawasan gugusan karang Mischief Reefs yang juga diklaim Filipina.

Selain itu, Filipina juga memiliki kendala lain yang belum terselesaikan sampai sekarang ini misalkan permasalahan mengenai krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Krisis ini membuat Filipina dalam keadaan terjerat hutang luar negeri yang menumpuk, tingkat inflasi yang tinggi, serta ekspor dan tingkat industri produksi pertanian yang terus menurun, dan ini sudah terjadi sejak pemerintahan Corazon Aquino.<sup>10</sup> Sehingga mewajibkan bagi siapapun pemerintahan yang berkuasa untuk mampu melakukan tindakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan diatas secara efektif.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pemerintahan Filipina yang terdahulu bertambah parah pada masa pemerintahan Joseph Estrada, dimana ia mengawali

---

<sup>9</sup> " Overview of Philippines-China Relations " , [www.philembassy-china.org/relations/index.html](http://www.philembassy-china.org/relations/index.html) .

<sup>10</sup> Soelistyawati Ismail Gani, Laporan Penelitian : Filipina : Krisis Politik dalam Pemerintahan Corazon Aquino, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992, hal. 38-44

pemerintahan sejak tanggal 27 Juli 1998. Dan saat itu Estrada menyampaikan rencana administrasinya dan dalam waktu yang bersamaan pula Estrada juga menyampaikan di hadapan rakyatnya bahwa keadaan keuangan pemerintah sedang dalam kondisi bangkrut. Hal ini memperlihatkan bahwa keadaan perekonomian Filipina semakin tidak membaik dan dkuatirkan akan terjadi suatu defisit ekonomi yang akan dialami oleh negara ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dari awal pemerintahan Filipina memperoleh kemerdekaan sampai saat Filipina dipimpin oleh Estrada, tetap saja Filipina lebih mengutamakan hubungan tradisionalnya dengan Amerika Serikat karena Amerika Serikat adalah sumber dana bagi Filipina untuk dapat mengatasi semua kesulitan ekonomi yang terjadi . Maka tidak heran jika semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Filipina sangat tergantung akan kepentingan Amerika Serikat. Bantuan yang diterima Filipina berupa bantuan dana dalam bentuk investasi langsung Amerika ke Filipina, kerjasama perdagangan Amerika – Filipina di bidang ekonomi dan keamanan seperti adanya pangkalan militer Amerika serikat di Subic Bay dan Clarck di Filipina, serta dalam bidang sosial dan budaya Amerika mewariskan sistem demokrasi dan sistem pendidikan. Tetapi setelah peristiwa 11 September 2001, perekonomian Amerika mengalami perlambatan sehingga terjadilah defisit negara.

Terpilihnya Presiden Gloria Arroyo sebagai Presiden Filipina yang baru yang menggantikan Estrada yang disingkirkan melalui sidang mengenai korupsi merupakan babak baru dalam pemerintahan Filipina. Dalam pemerintahannya, Presiden Gloria Arroyo mengambil tindakan yang sangat berani yakni dengan melakukan penutupan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di wilayah Filipina. Sejak saat itulah pemerintahan Filipina dibawah kepemimpinan presiden yang baru mempunyai

kebijakan administrative yang harus dijalankan untuk meningkatkan perekonomian negara, yakni :

1. Bahwa Cina, Jepang, dan Amerika Serikat, serta hubungan kerjasama antara ketiga negara ini akan sangat membawa pengaruh baik dalam bidang keamanan dan juga pembaharuan ekonomi dikawasan Asia Timur.
2. Lebih dan lebih lagi, semua keputusan mengenai kebijakan luar negeri harus dibuat dalam konteks untuk memajukan ASEAN.<sup>11</sup>

Kebijakan pemerintahan Gloria Arroyo berbeda dengan kebijakan pada pemerintahan sebelumnya. Pada masa pemerintahan Filipina di bawah Presiden Garcia, Filipina melakukan hubungan dagang dengan Cina Taiwan, bahkan Taiwan memiliki kedutaan besar di Manila demikian sebaliknya. Saat itu Filipina tidak sedang melakukan hubungan perdagangan dengan Cina dikarenakan Cina menjadi ancaman bagi negara – negara Asia Tenggara dalam penyebaran ideology komunisnya. Sehingga Filipina memutuskan hubungan dagang dengan Cina dan melakukan hubungan dagang dengan Taiwan. Selain dengan Taiwan, Filipina juga menjalin hubungan dengan Amerika dan sekutu – sekutunya, semua ini dilakukan oleh Filipina untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup.<sup>12</sup> Dan pada saat itu juga pembuatan kebijakan masih tergantung pada kepentingan Amerika Serikat, dan ini terjadi sampai pada era Estrada. Memang pada saat itu Filipina tetap melakukan kerjasama dengan negara – negara kawasan Asia tetapi karena saat itu perekonomian Amerika masih menjadi nomer satu di dunia maka

---

<sup>11</sup> Institute of Asia Pasific Studies, “ Philippines Relations with China and ASEAN ” , [www.cass.net.cn/chinese/s28\\_yts/wordch-en/en-aa/fdslt20020328.htm](http://www.cass.net.cn/chinese/s28_yts/wordch-en/en-aa/fdslt20020328.htm).

<sup>12</sup> Philippine APEC Study Center Network : PASCN Discussion Paper No. 99-16, oleh Benito Lim , “ The Political Economy of Philippines-China Relations “, dalam [Pascn.pids.gov.ph/Disclist/d99/s99-16.pdf](http://Pascn.pids.gov.ph/Disclist/d99/s99-16.pdf).

Filipina tetap mengandalkan hubungan tradisionalnya dengan Amerika dalam membantunya melakukan pembangunan terhadap perekonomian negara.

Hubungan antara Filipina – Taiwan memang mendatangkan begitu banyak kemajuan bagi kedua negara, terlebih – lebih bagi Filipina yang sedang mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat pada ekspor, impor, serta investasi yang dilakukan oleh Taiwan ke Filipina dan sebaliknya, yang mengalami banyak peningkatan meskipun tidak sebanyak yang terjadi pada perdagangan yang terjadi antara Filipina ke Cina ataupun dari Cina ke Filipina untuk lebih jelasnya seperti tabel dibawah ini :

**TABEL 1**  
**PERDAGANGAN BILATERAL FILIPINA-CINA-TAIWAN**  
**Tahun 1993-2001 (dalam Jutaan Dollar)**

PERDAGANGAN FILIPINA-CINA				PERDAGANGAN FILIPINA -TAIWAN			
Tahun	Ekspor ke Cina	Impor dari Cina	Neraca Perdagangan	Tahun	Ekspor ke Taiwan	Impor Dari Taiwan	Neraca Perdagangan
1993	173.874,2	180.663,5	6.789,3	1993	133.764,0	101.676,7	3.208,3
1994	163.966,8	294.046,4	13.079,6	1994	120.780,6	150.698,8	1.918,2
1995	212.938,5	475.876,2	26.293,7	1995	120.886,0	380.225,6	25.933,6
1996	327.921,5	676.506,6	54.365,9	1996	310.921,0	290.353,2	20.567,6
1997	244.411,3	871.565,7	627.154,4	1997	210.220,7	520.3372,1	310.151,4
1998	343.682,6	1.198.911,1	855.228,5	1998	222.864,9	382.811,2	166.946,3
1999	2.521.925,8	2.265.960,5	173.299,4	1999	354.900,9	289.756,8	65.144,1
2000	2.570.610,9	1.984.917,2	585.693,7	2000	1.256.700,1	1.227.568,9	29.131,2
2001	2.372.582,0	2.212.319,7	160.263,3	2001	1.110.600,9	1.095.577,8	15.023,1
<b>Total Perdagangan Filipina- Cina thn 1993-2001</b>	<b>8.931.913,9</b>	<b>10.160.766,9</b>		<b>Total perdagangan Filipina- Taiwan thn 1993-2001</b>	<b>3.841.639,1</b>	<b>2.995.714,7</b>	



Seperti yang terlihat pada tabel perdagangan diatas yaitu perdagangan antara Filipina-Cina, Filipina-Taiwan, sangat terlihat bahwa kedua negara, baik itu Taaiwan atau Cina memang memberikan sumbangan yang cukup besar pada neraca perdagangan Filipina setiap tahunnya. Tetapi apabila dilihat lebih jeli lagi perdagangan antara Filipina-Cina mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Sedangkan perdagangan antara Filipina-Taiwan memang naik dari tahun ketahun tetapi tidak sebanyak yang terjadi pada perdagangan antara Filipina-Cina. Secara jelasnya kita dapat membandingkan jumlah total perdagangan Filipina-Taiwan tahun 1993-2001, dimana nampak sekali perbedaan jumlah perdagangan diantara kedua negara, yaitu pada perdagangan Filipina-Cina jumlah ekspor Filpina ke Cina (1993-2001) adalah 8.931.913,9 US \$ sedang jumlah impor Cina (1993-2001) adalah 10.160.766,9 US \$. Sedangkan pada perdagangan antara Filipina-Taiwan, jumlah ekspor Filipina ke Taiwan (1993-2001) adalah 3.841.639,1 US \$, sedangkan jumlah impor dari Taiwan adalah 2.995.714,7 US \$.

Selain itu kalau dilihat dari sgi banyaknya investor yang berada di Filipina, Cina menduduki peringkat kedua setelah AS, sedang Taiwan menduduki peringkat ketiga setelah Cina. Atau dengan kata lain investasi Cina di Filipina lebih banyak dan besar dibandingkan investasi Taiwan di Filipina. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

**TABEL 2**  
**INVESTASI LANGSUNG CINA DAN TAIWAN DI FILIPINA**  
**Tahun 1999-2003 (dalam Jutaan Dollar)**

<b>Cina</b>						<b>Taiwan</b>					
<b>Sektor Investasi</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>Sektor Investasi</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Agriculture, Fishery and Forestry	16,7	130,6	8,5	491,1	178,0	Agriculture, Fishery and Forestry	53,4	149,0	85,8	78,6	284,1
Mining and Quarrying	2.085,9	1.164,2	2.115,5	1.759,6	4.081,3	Mining and Quarrying	347,6	11085,4	6,8	2,2	1.055,3

Manufacturing	6578,2	7820,3	6539,9	5430,1	4630,8	Manufacturing	4622,9	3088,6	435,9	880,6	4764,9
Construction	70,9	152,2	1509,2	912,8	109,8	Construction	42,1	233,4	34,1	55,3	121,1
Trade/Commerce	4331,6	2016,4	1366,1	2371,8	2237,7	Trade/Commerce	1505,2	1978,1	597,4	148,9	1258,5
Financial Intermediation and Service	6530,0	651,9	8337,9	6676,2	5395,4	Financial Intermediation and Service	1227,0	2344,7	18,5	457,6	1673,2
Real Estate	624,3	702,9	1360,6	329,8	697,2	Real Estate	10,3	337,8	281,5	631,0	2141,5
Services	2125,8	1404,1	329,7	1459,8	275,2	Services	179,0	192,7	165,4	201,5	1083,2
Others	5062,2	3804,9	14459,0	4137,5	2291,3	Others	553,4	3013,0	803,7	190,7	3351,2
<b>TOTAL</b>	<b>27250,7</b>	<b>23405,0</b>	<b>19350,6</b>	<b>13468,2</b>	<b>19346,4</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10169,2</b>	<b>11978,9</b>	<b>1588,7</b>	<b>2076,4</b>	<b>9030,5</b>

Total investasi langsung Cina di Filipina  
thn 1999-2003 = 102.820,9 US \$

Total investasi langsung Taiwan di Filipina  
thn 1999-2003 = 34.843,7 US \$

Sumber: ASEAN Secretariat :ASEAN FDI Data base

Pada kedua tabel investasi langsung Cina di Filipina dan Taiwan di Filipina diatas terlihat bahwa nampak sekali bahwa Cina memang mempunyai investasi lebih banyak di Filipina dibandingkan investasi Taiwan di Filipina. Jelasnya lagi apabila dibandingkan jumlah investasi langsung baik investasi Cina di Filipina maupun Taiwan di Filipina, yaitu total investasi langsung Cina di Filipina tahun 1999-2003 adalah sebesar 102.820,9 US \$, sedangkan total investasi langsung Taiwan di Filipina tahun 1999-2003 adalah sebesar 34.843,7 US \$. Hal itu berarti Cina menyumbang perekonomian Filipina lebih banyak dibandingkan dengan Taiwan walaupun tidak bisa dipungkiri kedua negara tersebut membantu dalam perekonomian Filipina.

Kalau dilihat dari hubungan politik baik Filipina-Cina maupun Filipina-Taiwan, banyak mengalami pasang surut hubungan sehingga pada akhirnya setelah Cina masuk menjadi anggota PBB maka dengan segera hubungan dua Cina harus diakhiri dan Filipina memilih untuk tetap "One China Policy" dan hubungan diplomatic Filipina-Taiwan harus diakhiri meskipun hubungan ekonomi masih berjalan seperti biasanya. Secara lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :

**TABEL 3**  
**KRONOLOGI HUBUNGAN POLITIK FILIPINA-CINA, FILIPINA-TAIWAN**

FILIPINA – CINA	FILIPINA – TAIWAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan diplomatic secara resmi dibuka tahun 1975 oleh Marcos dengan menandatangani komunike bersama “One China Policy”</li> <li>- Tahun 1976 : Perjanjian tentang keamanan dengan Taiwan dimusnahkan</li> <li>- Tahun 1976 : Kedutaan Taiwan di Manila diganti menjadi pusat ekonomi Budaya Pasifik, Kedutaan Filipina di Taiwan diganti menjadi Pusat Pertukaran Asia</li> <li>- 1982 : Pemerintahan Aquino menandatangani komunike bersama no : 313 yang isinya melarang kunjungan pejabat Filipina ke Taiwan</li> <li>- 1993 : Ramos melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Cina tanggal 26 April 1993 – 1 Mei 1993 untuk bicarakan masalah ekonomi &amp; spratly</li> <li>- 1994 : Ditandatangani kerjasama tehnologi dan ilmiah</li> <li>- 1994 : Jiang Zenin untuk pertamakali datang ke Filipina</li> <li>- Masa Pemerintah Yosep Estrada di Filipina-Cina menandatangani perjanjian kerjasama abad 21 dan menolak Lee Teng Hui yang akan datang ke Filipina.</li> <li>- Beberapa perjanjian bilateral antara Filipina dengan Cina :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Joint Trade Agreement (1975)</li> <li>b. Scientific and Tecnological Cooperation Agreement (1975)</li> <li>c. Postal Agreement (1978)</li> <li>d. Air Service Agreement (1979)</li> <li>e. Cultural Agreement (1979)</li> <li>f. Exchange Program in Arts, Education and Sports Agreement (1980)</li> <li>g. Credit Line Agreement (1984)</li> <li>h. Joint Trade Agreement (1987)</li> <li>i. Tourism cooperation Agreement (1990)</li> <li>j. Concerning encouragement and reciprocal of investment Agreement (1992)</li> <li>k. Bilateral Air Service Agreement (1997)</li> <li>l. Cultural Agreement (1998)</li> <li>m. Field agriculture Agreement (1999)</li> <li>n. Criminal Matters Agreement (2000)</li> <li>o. A treaty on extradition (2001)</li> <li>p. Combating Transnational Crime (2001)</li> <li>q. Air Service cooperation Agreement (2004)</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan diplomatic dibuka sejak merdeka 1946</li> <li>- Dibuat kesepakatan bersama tahun 1950 dibidang keamanan</li> <li>- Tahun 1951 Taiwan membangun Kedutaan Besar Taiwan di Filipina, dan sebaliknya Filipina membangun Kedutaan Besar di Taiwan</li> <li>- Tahun 1971 hubungan diplomatic terhenti karena Cina menjadi anggota PBB sehingga secara otomatis Taiwan disingkirkan dari PBB dan berarti setiap negara harus “One China Policy”</li> <li>- Walaupun hubungan diplomatic tidak ada tetapi hubungan ekonomi tetap ada</li> <li>- Kunjungan Kenegaraan Aquino ke Taiwan tahun 1973</li> <li>- Kunjungan Ramos di Subic pada Presiden Taiwan Lee Teng Hui 1993 (dimana kunjungan tersebut sangat merugikan Filipina karena dapat merusak hubungan Filipina-Cina yang sudah terjalin sangat baik sekali, atau dengan kata lain Filipina dapat dianggap menyalahi aturan “One China Policy” )</li> </ul>

Dengan melihat data-data diatas nampak jelas terlihat bahwa ada banyak perbedaan dari hubungan Filipina-Cina dan Filipina- Taiwan baik dibidang ekonomi, investasi maupun politik, dimana secara keseluruhan hubungan antara Filipina-Cina lebih menguntungkan daripada hubungan Filipina dengan Cina. Hingga semenjak RRC diterima dalam keanggotaan PBB pada tahun 1971, maka dengan segera wakil Cina yang dulu dimiliki oleh Taiwan disingkirkan dari organisasi dunia tersebut. Bahkan, negara – negara di dunia mengakui RRC sebagai satu – satunya wakil Cina yang sah, dan Taiwan merupakan bagian dari RRC. Kebijakan ini yang harus dianut dan diakui oleh setiap negara yang ingin melakukan hubungan diplomatic dengan Cina, dan Filipina juga negara yang mengakui kebijakan tersebut. Filipina melakukan kebijakan ini sejak Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos sampai saat Gloria Arroyo. Sekarang ini, pada masa pemerintahan Gloria Arroyo semua kebijakan luar negeri yang dibuat harus dalam konteks memajukan kawasan Asia, ini diwujudkan dengan meningkatkan kerjasama dengan Cina. Semua dapat terjadi dikarenakan semakin solidnya regionalisme di kawasan Asia Timur. Atau dengan kata lain Filipina memilih berhubungan dengan Cina dibandingkan dengan Taiwan walaupun tidak menyangkal tetap melakukan hubungan dengan Taiwan tetapi hanya dalam bidang perdagangan bukan politik yang dapat mengganggu stabilitas hubungan Filipina dengan Cina.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah ditulis oleh penulis, maka pokok permasalahannya adalah : “Mengapa Filipina tetap menerapkan Kebijakan Satu Cina (pada masa pemerintahan Gloria Arroyo)?”

#### D. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam membahas permasalahan diatas, saya memakai teori Kebijakan Luar Negeri ( Foreign Policy) dan teori Kepentingan Nasional, menurut Jack Plano dan Roy Olton.

Model aktor rasional merupakan pemikiran dari Graham T. Allison untuk mendiskripsikan proses pembuatan keputusan Politik Luar Negeri. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan – tindakan aktor rasional yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan. Model aktor rasional ini menjelaskan bahwa pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual.

Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan berkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap – tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh – sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan – pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif – alternatif haluan kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing – masing alternatif itu.<sup>13</sup>

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif – alternatif itu menggunakan criteria “Optimalisasi Hasil”. Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakannya. Mereka diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif

---

<sup>13</sup> Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional* : Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 234

kebijakan yang mungkin dilakukan dari semua sumber – sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>14</sup>

Umumnya kepentingan nasional sering dijadikan sebagai tolok ukur bagi para pengambil keputusan dari masing – masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan terhadap negara lain. Tentunya kepentingan nasional ini menjadi patokan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Bahkan setiap langkah dalam menentukan kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan sebagai kepentingan nasional.<sup>15</sup>

Menurut Jack Plano dan Roy Olton Kepentingan Nasional (National Interest):

*“ Tujuan mendasar serta faktor yang sangat menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional juga merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsure yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi “.*<sup>16</sup>

Sistem Internasional sekarang tidak lagi bersifat bipolar, yang mana hanya menggantungkan diri pada kekuatan dua negara yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sekarang sistem ekonomi internasional bersifat Multipolar, yang menghasilkan banyak negara yang bermunculan sebagai aktor internasional. Multipolarisme ini tidak hanya berkembang di kawasan – kawasan berat saja, tetapi di kawasan Asia pun multipolarisme sudah mulai ada. Ini dapat terbukti dengan munculnya Jepang, Cina , Korea, Hongkong sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam sistem ekonomi-politik internasional dewasa ini.

<sup>14</sup> Mohtar Mas'Oed, op – cit, hlm 235

<sup>15</sup> T.May Rudy, Studi Strategis : Dalam Tranformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin dalam bab Ketahanan, Kekuatan, dan Kepentingan Nasional. Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 118

<sup>16</sup> Jack Plano & Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional (terjemahan), Putra A.Bardin, Jakarta, 1999, hal. 6-7

Seperti yang telah kita ketahui bahwa sejak awal pemerintahan Corazon Aquino sampai terpilihnya Gloria Macapagal Arroyo sebagai presiden, Filipina mengalami kemerosotan ekonomi atau lebih jelasnya mengalami krisis ekonomi sehingga membuat Filipina terjerat hutang luar negeri yang menumpuk, tingkat inflasi yang tinggi, serta ekspor dan tingkat industri produksi pertanian yang terus menurun akibat bencana elnino, banyak pengangguran, belum ditambahkan korupsi yang dilakukan Josep Estrada yang membuat keadaan negara semakin memburuk. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keadaan Filipina benar – benar tidak baik.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dan awal pemerintahan Filipina Merdeka sampai Filipina dipimpin Arroyo, Pemerintah Filipina berusaha mengatasi masalah ekonomi yang dialami negara tersebut.

Kepentingan Nasional dari Filipina yang coba untuk dipenuhinya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara, dan semua dilakukan oleh pemerintahan Filipina melalui tindakan negara tersebut dengan melakukan aktivitas ekonomi dengan negara lain. Peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Filipina dilakukan dengan memperhatikan situasi lingkungan internasional yang terjadi dewasa ini. Maksudnya dalam hal ini adalah, Filipina tidak mungkin hanya mengandalkan terjadinya peningkatan perekonomian negaranya hanya dengan bergantung pada kekuatan perekonomian Amerika, terutama dengan terjadinya perlambatan perekonomian yang sedang dialami oleh Amerika, maka sejak saat itu Filipina mulai coba untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, seperti dengan Cina, Taiwan, dan negara – negara lainnya.

Disini pemerintah Filipina melakukan kerjasama dengan negara lain baik dibidang ekonomi maupun politik dengan mempertimbangkan untung rugi atas alternatif

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Atau dengan kata lain pemerintah menggunakan pertimbangan optimalisasi hasil dalam melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain.

Seperti kerjasama yang dilakukan dengan Taiwan (Cina Taiwan) dan kerjasama dengan Cina. Kerjasama dengan kedua negara tersebut didasarkan pada optimalisasi hasil dan pertimbangan untung – ruginya.

Kita tahu bahwa Filipina telah melakukan hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak merdeka 1946 baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Dibidang ekonomi, kerjasama Filipina – Taiwan mencangkup bidang ekspor, import, dan investasi. Tercatat total perdagangan diantara kedua negara pada tahun 1970 mencapai angka 10.378.309 US Dollar, dimana total ekspor 6.300.897 US Dollar dan total import sebesar 4.377.412 US Dollar. Sedangkan dibidang investasi 0,3% dari keseluruhan investasi di Filipina adalah merupakan investasi dari Taiwan.<sup>17</sup>

Pada bidang politik Filipina – Taiwan membuat kesepakatan bersama dalam bidang keamanan, termasuk disini dibangunnya Kedutaan Besar baik Kedutaan Filipina di Taiwan, dan sebaliknya Kedutaan Taiwan di Filipina. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Filipina dengan Taiwan benar – benar baik.

Tetapi semenjak RRC diterima dalam keanggotaan PBB pada tahun 1971, maka dengan segera wakil Cina yang dulu dimiliki oleh Taiwan disingkirkan dan digantikan oleh Cina. Bahkan, negara – negara didunia mengakui RRC sebagai satu – satunya wakil Cina yang sah, dan Taiwan merupakan bagian dari RRC. Inilah yang menyulitkan Filipina, padahal Filipina juga “One China Policy”, dan Filipina tidak mau rugi ketika

---

<sup>17</sup> Philippines – Taiwan Relation : “Trade and Investment” dalam [www.ops.gov.ph/2001/backgrounder.html](http://www.ops.gov.ph/2001/backgrounder.html)



ditagih janji kemerdekaan oleh Taiwan. Maka dengan demikian Filipina memutuskan untuk mengakhiri hubungan politik dengan Taiwan dan melakukan normalisasi dengan Cina. Maka pada tahun 1975 dibawah Pimpinan Marcos, Filipina menandatangani komunike bersama mengenai normalisasi hubungan diplomatik antara Filipina – Cina, atau dengan kata lain Filipina mengakui bahwa hanya ada Satu Cina dan Taiwan adalah bagian dari Cina. Oleh karena itu, semua perjanjian yang berhubungan dengan Taiwan dimusnahkan, mengganti nama Kedutaan Taiwan yang ada di Manila menjadi Pusat Ekonomi dan Budaya Pasifik, sementara Kedutaan Filipina yang ada di Taiwan menjadi pusat Pertukaran Asia.<sup>18</sup> Meskipun tidak dipungkiri sampai saat inipun antara Filipina dengan Taiwan tetap melakukan hubungan kerjasama tetapi hanya pada bidang ekonomi, dan tidak pada bidang politik yang dapat mengancam stabilitas hubungan antara Filipina – Cina, walaupun kerjasama ekonomi ini tidak begitu menguntungkan disbanding dengan kerjasama ekonomi antara Filipina – Cina.

Dengan keadaan situasi internasional yang seperti itu, maka Filipina juga terkena dampak dari sistem keterbukaan Cina. Filipina juga melakukan hubungan kerjasama dengan Cina, dalam rangka meningkatkan perekonomian negaranya. Hubungan kerjasama yang ada diantara negara – negara kawasan Asia Tenggara ini juga memperkenalkan wacana mengenai regionalisme kawasan Asia Timur. Kerjasama yang terjalin antara Filipina dengan Cina, membawa perubahan sedikit demi sedikit bagi perekonomian negara, yakni dengan terjadinya peningkatan volume ekspornya, dari tahun – ketahun, dimana hal tersebut lebih baik dari pada perdagangan dengan Taiwan.

Selain itu kepentingan lain yang coba diwujudkan Filipina yakni menjaga keutuhan wilayahnya, dengan menciptakan stabilitas keamanan di sekitar wilayah

---

<sup>18</sup> “ Overview of Philippines – China Relations “, dalam [www.philembassy-china.org/relations/indek.html](http://www.philembassy-china.org/relations/indek.html).

terdapat di Laut Cina Selatan. Ada pula yang menggunakan penyelesaian bilateral, seperti yang dilakukan oleh Arroyo pada masa pemerintahannya.

**Bab IV** : Berisi tentang kepentingan ekonomi Filipina mendukung Kebijakan Satu Cina. Diawali dari perkembangan situasi perekonomian kawasan Asia dan perekonomian Filipina pasca Perang Dingin, setelah itu akan dijelaskan mengenai pengaruh perkembangan perekonomian Cina bagi peningkatan perekonomian Filipina, dalam hal ini tentu saja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Melalui hubungan kerjasama bilateral yang tejalin antar kedua negara, dalam hal ini untuk melancarkan hubungan kerjasama ini pemerintahan Arroyo harus menegaskan kembali bahwasanya Filipina tetap menjalankan Kebijakan Satu Cina milik RRC.

**Bab V** : Kesimpulan.

sebagai seorang mahasiswa. Pada akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat menjadi bahan studi yang bermanfaat bagi pembacanya.

## **H. JANGKAUAN PENELITIAN**

Jangkauan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah selama kurun waktu Filipina dipimpin oleh Gloria Macapagal Arroyo, dan juga pada saat dia kembali terpilih lagi menjabat sebagai presiden Filipina sampai saat sebelum terjadinya kasus korupsi dan suap yang diduga dilakukan oleh Arroyo ketika pemilu yang telah menjadikannya presiden Filipina untuk yang kedua kalinya.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

**Bab I** : Berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Berisi tentang Kebijakan Satu Cina dan pengaruhnya terhadap hubungan Filipina-Cina-Taiwan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian,, sejarah, dan dampak One China Policy terhadap hubungan Filipina-Cina-Taiwan. Selain itu pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah hubungan ekonomi-politik Filipina-Cina\_Taiwan sebelum Arroyo berkuasa, serta perkembangan hubungan diantara ketiga negara tersebut.

**Bab III** : Berisi tentang upaya Filipina menjaga keutuhan wilayah, melalui peningkatan kerjasama bilateral 2 negara antara Filipina dengan Cina. Dalam bab ini saya akan menjelaskan diawali dengan posisi dari Laut Cina Selatan yang strategis dan klaim negara – negara atas Laut Cina Selatan, setelah itu akan timbul konflik antara Filipina dengan Cina, dan akan ada cara penyelesaian konflik ini yakni dengan multilateral yang mana melibatkan seluruh negara yang melakukan klaim terhadap beberapa pulau yang

investasi, dimana kerjasama ini lebih menguntungkan dari pada kerjasama dengan Taiwan selain itu dapat menjaga keutuhan wilayah dengan cara melakukan kerjasama bilateral dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan, dalam hal ini mengenai Kepulauan Spratly.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menulis adalah melalui metode penelitian kualitatif. Dimana teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Data – data sekunder diperoleh dari berbagai literature, buku – buku, artikel, majalah, internet, penulis dan penerbit ilmiah lainnya yang tetntu saja memiliki relevansi yang sangat jelas dengan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

### **2. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Deskriptif – Analysis*. Yang dimaksudkan dari metode ini adalah melukiskan data dan fakta seperti apa adanya dan analisis yang dilakukan lewat penemuan hubungan – hubungan variabel yang ada, memakai atau menginterpretasikan hubungan – hubungan yang ada dan pada akhirnya menarik suatu kesimpulan.

## **G. TUJUAN PENELITIAN**

Untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan bagi Filipina dalam mendukung Kebijakan Cina mengenai Konsep Satu Cina. Selain itu penulis juga mengharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sarana dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan, dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan pemikiran penulis

tersebut Filipina dan Cina melakukan penyelesaian melalui jalur damai yakni diplomasi antar negara yang bersengketa, baik itu yang bersifat multilateral ataupun bilateral. Dengan dibantu oleh ASEAN penyelesaian masalah ini menghasilkan *Code of Conduct* yang melibatkan semua negara – negara yang bersengketa dan tentu saja ini bersifat multilateral. Namun sejalan dengan semakin meningkatnya peran Cina dalam politik dunia dan semakin pentingnya Cina dalam pekonomian Filipina maka diharapkan bahwa penyelesaian terhadap permasalahan Laut Cina Selatan, terutama sengketa Kepulauan Spratly dapat dilakukan tidak hanya pada tingkat multilateral tetapi juga dapat dilakukan melalui penyelesaian bilateral dua negara, melalui peningkatan kerjasama diantara dua negara.

Maka dari urain diatas dapat disimpulkan mengapa Filipina tetap menerapkan One China Policy pada masa Pemerintahan Gloria M. Arroyo karena dengan berhubungan dengan Cina terdapat keuntungan yang lebih besar dari pada berhubungan dengan Taiwan yang dapat menimbulkan masalah besar ketika Taiwan menagih janji kemerrdekaannya. Selain itu terdapat keuntungan yang lebih baik menyangkut masalah keutuhan wilayah yaitu dapat diselesaikannya masalah Spratly dengan baik – baik tanpa melalui gencatan senjata.

#### **E. HIPOTESA**

Berangkat dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka hipotesa dari mengapa Filipina tetap menerapkan Kebijakan Satu Cina pada masa Pemerintahan Gloria Macapagal Arroyo karena dengan menerapkan Kebijakan Satu Cina maka Filipina dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan hubungan kerjasama dengan Cina terutama pada pasar ekspor, impor, serta

Filipina. Ini menyangkut mengenai kasus persengketaan kepulauan Spartly antara dua negara, yakni Filipina dengan Cina. Filipina merupakan negara kepulauan, yang menurut konvensi hukum laut bagian IV dalam pasal 46 – 54 yang mendefinisikan arti dari negara kepulauan. Menurut pasal 46, menyatakan bahwa :

*“ Istilah kepulauan berarti kepemilikan terhadap gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantara pulau – pulau tersebut dan wujud – wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, politik yang hakiki, atau yang secara histories dianggap sebagai demikian ( penekanan ditambahkan pada kat “hakiki” dan secara “histories” ). Negara kepulauan didefinisikan untuk memberi arti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau – pulau lain “. <sup>19</sup>*

Menyangkut hal ini, Filipina mengklaim bahwasanya Kepulauan Spartly atau yang dikenal sebagai kalayan masuk kedalam wilayah territorial Filipina. Klaim yang dilakukan Filipina ini berdasarkan atas beberapa hal yakni bahwa Filipina megemukakan, gugus – gugus pulau yang didudukinya itu sebagai “tanah tak bertuan”, yang sedang tidak dimiliki oleh negara manapun. Selain itu Filipina juga berpegang pada perjanjian San Francisco 1951, yang antara lain menyatakan bahwa Jepang telah melepaskan haknya terhadap kepulauan Paracel dan Spartly, tanpa mengemukakan diserahkan pada negara lain.<sup>20</sup> Tidak hanya Filipina saja yang melakukan klaim atas kepulauan Spartly, tetapi kalim serupa juga dilakukan oleh Cina. Mengenai hal ini Cina mengklaim bahwa keseluruhan Kepulauan Spartly adalah termasuk kedalam wilayah Cina, kepemilikan ini berdasarkan atas histori Cina.

Persengketaan mengenai Kepulauan Spartly ini tentu saja menimbulkan konflik internasional antara negara – negara ASEAN dan Cina, termasuk Filipina dan ini mengganggu keutuhan wilayah Filipina. Untuk menyelesaikan permasalahan Spartly

<sup>19</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional ( edisi kesepuluh )*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal.353

<sup>20</sup> James Luhulima, *Op – cit* , hal. 18